

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia, 2018.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia, 2007.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Otto, Jan Michiel. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Salman, Otje. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suparni, Niniek. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

_____. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan LNRI Nomor 3209.

_____. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 4 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan LNRI Nomor 4959.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 3 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan LNRI Nomor 6525.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Achmad, M Daus, Ibrahim Ibrahim, dan Suzanalisa Suzanalisa. “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi.” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2017): hlm. 1–43. doi:10.33087/LEGALITAS.V1I2.62.

Astuti, Wira Fuji, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi. “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil.” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1, No. 3 (2017): hlm. 317–38. doi:10.29244/jskpm.1.3.317-338.

Castrilli, Joseph F. “Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirements.” (1999).

Diansah, Hendri, Usman Usman, dan Yulia Monita. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*,

Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 15–30. doi:10.22437/PAMPAS.V3I1.17704.

Hanan Nugroho, “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 117–125. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>.

Hannah Owusu-Koranteng, “Presentation on the Social Impact of Gold Mining in Ghana: Unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights.” *By The 11th Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn From 22nd- 24th September 2000*. (2000)

Kuyek, Joan, “Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources”. *Background for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit*, (2005): hlm. 1-6.

Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, dan Elizabeth Siregar. “Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 146–62. doi:10.22437/pampas.v3i2.20035.

Naziva, Dien Nabila, Usman Usman, dan Dessy Rakhmawati. “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3 (2021): hlm. 76–84. doi:10.22437/pampas.v2i3.16324.

Nugroho, Hanan. “Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 117–25. doi:10.36574/jpp.v4i2.112.

Prihatmaja, Moch. Reza Restu, Hafrida Hafrida, dan Tri Imam Munandar. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 57–72. doi:10.22437/pampas.v2i1.12647.

Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, Jaya Prana Pinem. “Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2022): hlm. 192–199. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>.

Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, dan Erwin Erwin. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3 (2023): hlm. 249–63. doi:10.22437/pampas.v3i3.20748.

Veronika, Ayu, Kabib Nawawi, dan Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3 (2021): hlm. 45–57. doi:10.22437/pampas.v1i3.11085.

D. Website

Wordpress.com. "Memahami Kepastian Hukum," 2013. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>.